

Penentuan nasib sendiri bukan sekedar merdeka secara politis

Perkembangan terbaru di Timor-Leste

**Oleh Charles Scheiner
Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis
Oktober 2006**

Makalah ini diadaptasi dari suatu presentasi dalam konferensi tentang International Law and the Question of Western Sahara di Institute of Social Studies, Den Haag, Belanda, 28 Oktober, 2006.

Penulis terlibat dalam gerakan solidaritas Timor-Leste sejak tahun 1991 bersama the East Timor Action Network (ETAN) di Amerika Serikat dan the International Federation for East Timor (IFET). Dia bisa dihubungi melalui PO Box 1182, White Plains, NY 10602 USA, email: charlie@laohamutuk.org.

La'o Hamutuk – Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis
PO Box 340, Dili, Timor-Leste
Website: www.laohamutuk.org
Email: info@laohamutuk.org.

Hukum internasional telah lama mengakui bahwa “semua bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.”¹ Empat puluh enam tahun lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendeklarasikan bahwa “rakyat di seluruh penjuru dunia sungguh-sungguh menginginkan berakhirnya pelbagai bentuk kolonialisme”, karena “menghalangi cita-cita PBB untuk perdamaian universal.”² Dari tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, kebanyakan negara jajahan mendapatkan kedaulatan mereka. Ketika Dewan Perwalian menyelesaikan tugasnya pada tahun 1994, wilayah dalam daftar PBB tentang wilayah-wilayah yang tak berpemerintahan sendiri (non-self-governing) tinggal sedikit. Timor-Leste merupakan yang terbesar di antaranya.

Pada tahun 1999, PBB menyelenggarakan referendum untuk penentuan nasib sendiri di Timor-Leste, dan para pemilih memilih untuk merdeka, sehingga akhirnya negara baru tersebut menjadi pemerintahan sendiri pada tahun 2002. Artikel ini akan menjajaki pengalaman Timor-Leste selama empat tahun pertama mereka sebagai negara merdeka dan menarik pelajaran yang mungkin bisa berguna bagi Timor-Leste sendiri, maupun bagi mereka yang masih sedang berjuang mencapai kemerdekaan.

PBB membuat daftar beberapa wilayah, khususnya Sahara Barat, yang masih menunggu hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Sejumlah kawasan yang sebenarnya terjajah, yakni Papua Barat, Tibet, Kanaky (*New Caledonia*), Kashmir, Tahiti-nui (*French Polynesia*), Puerto Rico, Guam, tetap berada dalam kekuasaan asing, tetapi Majelis Umum PBB tidak menaruh mereka dalam daftar wilayah-wilayah yang tak berpemerintahan sendiri.

Pendudukan Indonesia di Timor-Leste pada tahun 1975 disambut dengan ketidakpedulian dan sikap diam dari dunia internasional selama puluhan tahun. Namun, pada akhir tahun 1990-an, perubahan politik di Indonesia dan di dunia pada umumnya akhirnya memungkinkan diadakannya jajak pendapat di mana rakyat Timor-Leste secara besar-besaran memilih untuk menolak pemerintahan Indonesia. Tiga tahun kemudian, Republik Demokratik Timor-Leste menjadi lulusan terbaru dari daftar wilayah-wilayah yang tak berpemerintahan sendiri, menjadi sebuah negara yang berdaulat dan mempunyai pemerintahan sendiri. Prestasi ini memberikan inspirasi kepada rakyat di seluruh dunia yang bercita-cita menentukan nasib mereka sendiri.

Merdeka membuat rumit

Sejak referendum, realitas di Timor-Leste sangat berbeda dengan citra yang dikembangkan oleh PBB sebagai anak yang sangat dibanggakan. Saat ini (Oktober 2006), Timor-Leste lebih seperti anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh dunia internasional. Contohnya, posisi puncak di tiga lembaga yang paling berkuasa di negara tersebut - Bank Dunia, Misi PBB dan Kedutaan Amerika Serikat – saat ini sedang kosong. Kedutaan Inggris baru-baru ini tutup untuk selamanya.

Selama tujuh tahun terakhir, Timor-Leste telah menjadi tuan rumah lima misi PBB. UNAMET (*The United Nations Assistance Mission in East Timor*) yang menyelenggarakan referendum pada tahun 1999, melakukan evakuasi ketika tentara Indonesia dan para milisinya melakukan pembunuhan dan pembakaran di negara tersebut. UNTAET (*The UN Transitional Administration*) kembali sebulan kemudian untuk memerintah sampai pemerintahan lokal yang dipilih oleh rakyat mengambil alih pada bulan Mei 2002. UNMISSET (*The Mission in Support of East Timor*) kemudian

¹ Pasal 1, Ayat 1 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, keduanya disetujui pada tahun 1966 dan dijalankan sejak tahun 1976.

² Resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) (1960) tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Bangsa-bangsa Jajahan

mendukung dan melatih orang Timor untuk berfungsi sebagai polisi, pegawai negeri dan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain. Sejak tahun 2005, UNOTIL (*The UN Office in Timor-Leste*) telah berkoordinasi untuk menggantikan pasukan perdamaian PBB dengan memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya.

Pada bulan April 2006, sebulan sebelum UNOTIL berakhir, ibukota Timor-Leste tercerai-berai – pertikaian antara tentara dan polisi, perang antar gang di antara anak-anak muda pengangguran, perpecahan regional dan intrik-intrik politik telah mendesak Perdana Menteri Mari Alkatiri untuk mundur. Dia digantikan oleh Menteri Luar Negeri José Ramos-Horta, yang juga menjabat Menteri Pertahanan. Banyak orang Timor Leste yang tewas, ratusan orang terluka, ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan puluhan ribu masih mengungsi dari rumah mereka sampai setengah tahun berikutnya.

Pada akhir Mei, pemerintah Timor-Leste mengundang hampir 3.000 orang tentara internasional, kebanyakan berasal dari Australia, untuk memperbaiki ketertiban dan keamanan. Pada tanggal 25 Agustus, Dewan Keamanan PBB membentuk UNMIT (*the United Nations Integrated Mission in Timor-Leste*). Yang termasuk 1.600 polisi, dan juga ditambah sejumlah staf PBB militer dan sipil. Pertikaian bersenjata telah berkurang, dan pasukan polisi serta militer Timor-Leste tidak lagi terlibat secara langsung, tetapi pasukan perdamaian hanya efektif sebagian. Kelompok-kelompok pemuda terus bertikai satu sama lain, banyak orang terluka atau terbunuh hampir setiap hari, dan sebagian besar penduduk Dili masih berada dalam kamp pengungsian, ditambah lagi kemungkinan ancaman kesehatan masyarakat ketika musim hujan mulai bulan depan.

Baru-baru ini saya bertanya kepada beberapa veteran pejuang kemerdekaan Timor-Leste tentang apa yang kelompok pejuang kemerdekaan lainnya bisa belajar dari pengalaman mereka. Setengah bercanda mereka mengatakan: “Jangan merdeka”. Hal itu menunjukkan bagaimana krisis tersebut telah mengguncangkan rasa percaya diri mereka terhadap kemampuan mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Penentuan nasib sendiri secara penuh

Beberapa ilmuwan hukum, khususnya Pelapor Khusus PBB Hector Espiell, menjabarkan tentang hak suatu bangsa untuk menentukan nasib sendiri “tidak hanya penyelesaian proses pencapaian kemerdekaan atau status hukum oleh rakyat di bawah kekuasaan kolonial dan orang asing, tetapi juga pengakuan tentang hak mereka untuk memelihara, menjamin dan menyempurnakan kedaulatan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka secara penuh”. Espiell menjelaskan bahwa “Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri memiliki keabadian, tidak berhenti setelah mendapatkan kemerdekaan politik dan meluas ke semua bidang, tentu saja termasuk masalah ekonomi, sosial dan budaya.”³

Untuk mencapai kemerdekaan di zaman global ini, diperlukan upaya lebih besar daripada sebuah referendum. Timor-Leste telah diperintah oleh PBB; Rencana Pembangunan Nasional mereka sebagian besar telah ditulis dan dilaksanakan oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia; Dana Moneter Internasional (IMF) merancang kebijakan fiskal dan moneter; negara-negara yang disebut “mitra pembangunan” memutuskan proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan. Struktur polisi dan militer yang telah membuat banyak masalah baru-baru ini sebagian besar diciptakan dan dilatih oleh “para penasihat internasional”. Sembilan puluh persen ekonomi tergantung pada

³ Espiell, Hector Gros “The Right to Self Determination: Implementation of United Nations Resolutions.” Penelitian yang dilakukan oleh the UN Special Rapporteur of the Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities (E/CN.4/Sub.2/405/Rev.1), 1980. Dikutip dalam www.tamilnation.org/selfdetermination/80grosepsiell.htm

perusahaan minyak asing. Negara baru ini, yang terhimpit di antara dua tetangga yang egois, harus menyerahkan cadangan minyaknya kepada Australia dan meninggalkan keadilannya kepada Indonesia, di mana para petinggi militer termasuk Presiden yang saat itu berkuasa mencari prestasi dalam karir mereka dengan ikut serta dalam pendudukan Timor-Leste yang ilegal dan brutal.

Timor-Leste telah berubah bentuk dari sebuah gerakan kemerdekaan menjadi sebuah negara, dan para pemimpinnya harus meninggalkan banyak idealisme mereka demi realitas politik. Teman-teman sepergerakan di Papua Barat, Tibet dan Burma telah mendapati bahwa para mantan teman seperjuangan mereka yang sekarang menjadi pejabat pemerintah kini kurang bebas bergerak, dibandingkan ketika mereka masih menjadi pejuang kemerdekaan. Walaupun saya merasa khawatir terhadap banyaknya keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Timor-Leste, saya paham bahwa dengan kemerdekaan perlu adanya kompromi.

Saat bersejarah Timor-Leste

Referendum penentuan nasib sendiri Timor-Leste tujuh tahun yang lalu dimungkinkan karena konfigurasi sejarah yang unik dan khusus yang mungkin tidak akan terulang lagi dalam gerakan lainnya selama milenium ini. Beberapa hal yang perlu untuk diingat adalah:

Timor-Leste hanya merupakan 1/122 luas Indonesia. Walaupun propaganda Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan Timor-Leste merupakan langkah pertama dalam pembongkaran Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebenarnya provinsi yang terlepas tersebut terlalu kecil dan terlalu miskin untuk punya makna bagi kebanyakan orang Indonesia, selain para prajurit yang telah membangun karir atau kehilangan kawan atau sahabat di sana. Di pihak lain, Papua Barat yang memiliki kekayaan sumberdaya alam, belum merdeka antara lain karena Sukarno dan para penerusnya telah membuat aneksasinya menjadi suatu *cause célèbre* selama 50 tahun terakhir. Sahara Barat tetap belum menentukan nasib sendiri antara lain karena mereka memiliki area seluas 3/5-nya yang digambarkan oleh Maroko, penjajah mereka, suatu bagian integral dari wilayah mereka.

Komite Hadiah Nobel, yang mencari kasus yang akan memiliki dampak positif, memberikan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta. Pada saat itu, komite tersebut belum memperluas cakupan mereka untuk memasukkan aktivis lingkungan dan keadilan ekonomi.

Secara ekonomi dan politik rezim Suharto jatuh pada tahun 1998. Setelah itu mereka telah memiliki empat presiden. B.J. Habibie, pengganti Suharto, percaya bahwa Indonesia akan memenangkan referendum di Timor-Leste, sehingga bisa mengakhiri rasa malu di mata dunia internasional yang telah mereka tanggung selama beberapa dasawarsa. Gerakan kemerdekaan Timor-Leste telah siap setelah perjuangan panjang dalam arena militer, klandestin dan diplomatik, mengambil kesempatan ini, namun penyingkiran 32 tahun kediktatoran Suhartolah yang membuka jalan.

Pada tahun 1999, setelah serangkaian kegagalan PBB di Somalia, Rwanda, Yugoslavia dan Sahara Barat, komunitas internasional memerlukan suatu keberhasilan. Dengan kematian sekitar 200.000 rakyat Timor-Leste, argumentasi legal dan moral bagi penentuan nasib sendiri tidak bisa dipungkiri lagi, Australia, Amerika Serikat dan para pendukung integrasi lain mulai siap untuk mengakuinya. Namun bahkan pada saat itu mereka tidak mau memaksa Indonesia untuk menyerahkan keamanan selama periode sebelum referendum kepada PBB. Ironisnya, perjanjian

referendum tersebut⁴ malah untuk pertama kali PBB memberikan legitimasi terhadap pasukan Indonesia di Timor-Leste, dan menugaskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap keamanan selama pemilihan umum. “Gurauan kejam” ini⁵ membuka peluang bagi tentara Indonesia dan milisi yang mereka pimpin menjalankan teror pra-referendum dan pasca-referendum menjadi kampanye bumi hangus yang menewaskan 1.500 orang, dan tiga perempat rakyat Timor-Leste terpaksa melarikan diri. Mereka juga merusak 75% bangunan serta hampir semua infrastruktur.

Solidaritas internasional untuk Timor-Leste sangat beragam, berskala global dan strategis, dalam bekerja dengan para konstituen yang berpengaruh, seperti dijelaskan di bawah ini.

Timor-Leste saat ini

Krisis keamanan dan keefektifan pemerintahan yang terjadi di ibukota Timor-Leste selama enam bulan terakhir merupakan sebuah tragedi bagi masyarakat Timor-Leste, dan bagi semua yang terinspirasi oleh kemerdekaan mereka. Namun seperti Timor-Leste yang belajar dari negara-negara yang tergantung pada minyak tentang bagaimana menghindari “kutukan sumber daya alam”, mungkin kemalangan Timor-Leste bisa memberikan pembelajaran kepada bangsa-bangsa lain yang memulai usaha mereka untuk mendapatkan kedaulatan. Pembelajaran ini mungkin juga akan berguna bagi Timor-Leste untuk terus menjalankan usaha pembangunan bangsa, dan bagi PBB dan lembaga-lembaga internasional lain yang tindakannya kadang-kadang kontra-produktif terhadap cita-cita penentuan nasib sendiri.

Terlalu dini untuk memahami semua penyebab krisis di Timor-Leste saat ini. Beberapa hal berakar dalam perebutan kekuasaan dan konflik pribadi baik yang baru atau yang sudah lama berlangsung. Laporan-laporan baru yang diberikan oleh Komisi Penyelidikan PBB⁶ dan *International Crisis Group*⁷ yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut, terfokus pada tindakan-tindakan individual, tidak menyorotinya secara lebih fundamental, instruktif dan menantang alasan kontekstual, komunal dan institusional.

La’o Hamutuk⁸ adalah sebuah ornop Timor-Leste yang telah memonitor dan menganalisis kegiatan PBB, Bank Dunia, dan agen-agen internasional lain di Timor-Leste sejak tahun 2000. Seperti telah didiskusikan oleh PBB tentang bagaimana cara menanggapi peningkatan situasi krisis, La’o Hamutuk mengusulkan kepada Sekretariat dan Dewan Keamanan PBB,⁹ dengan menyoroti hal hal yang perlu dipertimbangkan misi PBB di masa akan datang, dengan mengacu pada laporan-laporan yang telah banyak mengidentifikasi masalah-masalah ini.

⁴ *Agreement Between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor* (www.etan.org/et99/may/1-8/6un.htm) dan *East Timor Popular Consultation Agreement Regarding Security* (www.etan.org/et99/may/1-8/6unagre.htm).

⁵ Persetujuan ditandatangani oleh Sekjen PBB Kofi Annan dan Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia pada tanggal 5 Mei 1999. Di antaranya, The International Federation for East Timor, mendesak supaya PBB bertanggungjawab terhadap keselamatan publik. www.etan.org/et99/may/1-8/4ifet.htm

⁶ Laporan Komisi Khusus PBB bagi Kemerdekaan Timor Leste, Oktober 2006 www.ohchr.org/english/docs/ColReport-English.pdf

⁷ International Crisis Group, “Resolving Timor-Leste’s Crisis”, 10 Oktober 2006. www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=4438&l=1

⁸ Juga dikenal sebagai *the Timor-Leste Institute for Reconstruction Monitoring and Analysis*, La’o Hamutuk diinisiasi oleh gerakan solidaritas Timor-Leste sebagai tanggapan terhadap para aktivis Timor yang ingin tahu lebih lanjut tentang lembaga-lembaga internasional yang diturunkan di negara mereka yang baru saja lepas dari penjajahan. Lembaga tersebut juga melayani saluran komunikasi dua arah antara masyarakat sipil Timor dan lembaga-lembaga tersebut. Penulis adalah seorang peneliti dari La’o Hamutuk. Lihat www.laohamutuk.org.

⁹ La’o Hamutuk, “Suggestions for the Next United Nations Mission in Timor-Leste”, 22 Juni 2006. www.laohamutuk.org/reports/UN/06LHSuggestUN.html

Pembangunan bangsa dan pengembangan-kapasitas

Hampir setiap bangsa baru dalam sejarah, termasuk banyak negara yang makmur dan sudah lama merdeka, memerlukan waktu sedasawarsa atau lebih untuk membangun perdamaian, kesatuan nasional, pemerintahan konstitusional yang stabil, dan penegakan hukum. Pembangunan negara memerlukan kesabaran, waktu dan percobaan dan belajar dari kesalahan. Prioritas politik negara-negara anggota PBB mulai bergeser dari Timor-Leste setelah tentara Indonesia pergi, tetapi kebutuhan untuk dukungan internasional, termasuk untuk adanya suatu pemerintahan transisi, baru saja mulai.

Semua misi PBB memiliki kekurangan yang sistemik dan struktural, termasuk orientasi darurat/krisis; tanggungjawab personil terhadap birokrasi PBB, bukannya terhadap situasi dan kebutuhan lokal; hanya sedikit perempuan yang berperan sebagai pengambil keputusan; mandat, perencanaan dan pengangkatan yang berjangka pendek; staf internasional yang kualifikasinya di bawah standar; tidak menggunakan kapasitas lokal; sekedar menyenangkan negara-negara yang berkuasa; dan terlalu banyak fokus tentang tonggak-tonggak bersejarah (misalnya pemilihan umum). Bila hal-hal ini tidak ditangani dengan baik, penambahan jangka waktu Misi PBB saja tidak akan cukup untuk meningkatkan hasilnya.

Pengembangan kapasitas, pendampingan, dan penyerahan kekuasaan kepada staf orang Timor-Leste dilakukan secara tergesa-gesa, setengah hati, dan dengan cara yang buruk. UNTAET telah menjalankan pemerintahan selama 2 tahun sebelum menyadari bahwa *Peralihan* lebih penting dibandingkan *Pemerintahan*. Banyak penasihat internasional yang hanya memiliki sedikit pengalaman mengajar, dan dipekerjakan dengan kontrak jangka pendek. Dengan semua posisi internasional berakhir pada setiap pergantian misi (setiap satu atau dua tahun), banyak staf internasional menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengorientasikan diri atau mencari posisi lain, bukannya menjalankan pekerjaan mereka atau mentransferkan ketrampilan mereka kepada mitra lokal mereka. Melihat sejarah Timor-Leste, banyak staf orang lokal yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang terbatas, namun mereka harus mengisi posisi-posisi dan memikul tanggung jawab yang biasanya memerlukan pendidikan bertahun-tahun atau pelatihan di lapangan.

Mengatasi ketidakadilan

Kekerasan pendirian pemerintah Indonesia dan keterbatasan politik internasional telah menghambat proses untuk mengadili para arsitek kejahatan paling serius, yang dilakukan selama 24 tahun pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste. Pemerintah Timor-Leste sendiri tidak bisa mengatasi kekebalan yang berlaku, dan pelaku kejahatan kemanusiaan antara tahun 1975 dan 1999 justru memegang kekuasaan di Indonesia. Ketidakadilan yang dirasakan secara sangat mendalam oleh para korban kejahatan tersebut (yakni mayoritas rakyat Timor-Leste), membuat preseden tentang ketiadaan hukum saat ini. Sistem yudisial Timor-Leste sendiri dilumpuhkan oleh kurangnya staf yang berpengalaman, keterbatasan bahasa, aturan hukum yang campur-aduk, dan langkanya sumber daya material, sedikitnya warga Negara Timor Leste yang telah tinggal di negara yang berdasarkan hukum. Dalam krisis saat ini, kekerasan telah mengisi kesenjangan keadilan. Para pelaku mengantisipasi adanya kekebalan hukum dan para korban yang kurang percaya diri di pengadilan, mengatasi masalah mereka sendiri. Hal ini telah disebut-sebut oleh Komisi Penyelidikan PBB, tetapi tidak diidentifikasi sebagai akibat dari penolakan Dewan Keamanan PBB untuk mendirikan pengadilan internasional bagi Timor-Leste.

Salah satu tugas paling menantang dari suatu perjuangan anti-kolonial dalam mencapai kemenangan adalah mengubah hubungan rakyat dengan pemerintah, dari perlawanan menuju kepemilikan, dan baik para penasihat internasional maupun para pemimpin politik Timor-Leste tidak pernah efektif dalam hal ini. Para politisi dan partai-partai politik menyerang integritas lawan

mereka, bukannya mengajukan kebijakan alternatif atau membangun koalisi. Para pemilih yang tidak puas menghina atau putus asa terhadap wakil-wakil yang mereka pilih, bukannya melobi mereka. Para pejabat terpilih bertanggung jawab pada partai atau pelindung mereka, bukannya pada para pemilih atau konstituen mereka. Peliputan media menjelaskan tuntutan dan tuntutan balik, tanpa analisis atau fakta untuk membantu para pembaca memutuskan mana yang benar. Timor-Leste akan menyelenggarakan pemilihan Presiden dan Parlemen mereka yang pertama sekitar enam bulan lagi; banyak yang khawatir bahwa pemilihan tersebut tidak akan berlangsung dengan damai, bebas atau adil, karena adanya krisis saat ini dan keterbatasan pengalaman dalam hal demokrasi.

Kesatuan nasional, yang secara relatif mudah dipelihara ketika menghadapi musuh yang sama, menjadi jauh lebih sulit setelah penjajah pergi. Tetap ada ketidakpercayaan terhadap orang yang membantu pemerintah pendudukan ataupun yang dicurigai sebagai kolaborator, di antara mereka yang berjuang untuk kemerdekaan. Perbedaan regional dan kesukuan menjadi bertambah besar. Keterampilan mereka yang kembali dari pengasingan, yang sering memiliki kesempatan pendidikan yang lebih besar, perlu dimanfaatkan tanpa menciptakan penolakan dari mereka yang selama masa pendudukan tetap tinggal dan berjuang di Timor-Leste. Harapan yang tidak realistis bahwa hidup akan segera menjadi lebih baik setelah merdeka tidak terjadi, sehingga hal ini membuat kecemburuan sosial ketika ada orang yang lebih makmur dari yang lain. Korupsi, nepotisme dan kroniisme ada di semua masyarakat – tetapi lebih parah dalam pendudukan ilegal oleh penjajah yang korup, suatu pola yang menantang untuk diatasi.

Trauma dan pengungsian selama puluhan tahun seperti yang terjadi pada rakyat Timor-Leste telah menciptakan dampak psikologis. Orang menjadi cepat panik, dan sebagian orang mengalami kilas balik atau kemarahan yang tidak masuk akal. Masalah-masalah ini perlu dihadapi secara sungguh-sungguh dengan kebijakan kesehatan publik, dan sebagai prasyarat bagi kepercayaan dalam proses demokrasi. Media yang efektif, bertanggungjawab dan bisa dipercaya, serta sistem komunikasi juga sangat penting: ketika orang tidak percaya pada informasi dari sumber resmi atau sumber publik, mereka bergantung pada rumor, imajinasi dan informasi yang salah.

Timor-Leste beruntung bahwa pemerintah Indonesia yang sekarang tidak mencoba mengguncang kestabilan Timor-Leste yang masih tetap membeli sebagian besar barang impornya – hampir semua barang buatan pabrik harus diimpor – dari Indonesia. Kedua pemerintah menikmati hubungan diplomatik yang bersahabat, selama Timor-Leste tidak melanjutkan proses hukum untuk mengadili para pelanggar HAM di Indonesia. Walaupun kebanyakan rakyat Indonesia masih menganggap orang Timor-Leste tidak tahu berterima kasih, hanya sedikit orang akan mendukung pendudukan kembali tetangga baru mereka. Orang-orang Indonesia yang memilih tetap tinggal di Timor-Leste sebagai imigran atau warganegara diterima oleh masyarakat.

Angkatan bersenjata

Para pemimpin Timor-Leste berharap untuk menciptakan sebuah bangsa tanpa angkatan bersenjata. Tetapi setelah terjadi kampanye teror tahun 1999, mereka memutuskan bahwa mereka memerlukan pasukan pertahanan untuk menghalangi serangan dari perbatasan. Ketika UNTAET membentuk FALINTIL-FDTL (F-FDTL), militer Timor-Leste, keputusan-keputusan mendasar dibuat oleh konsultan-konsultan internasional yang memiliki pemahaman terbatas tentang kebutuhan, sejarah dan masyarakat Timor-Leste. Nama cangkokan F-FDTL merupakan gabungan antara mantan tentara perjuangan kemerdekaan, FALINTIL (Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor-Leste) dan aparat negara baru, FDTL (Forças Armadas de Defesa de Timor-Leste). Walaupun dalam pembentukan angkatan bersenjata baru tersebut diupayakan untuk menghormati dan memberikan pekerjaan kepada beberapa veteran gerilyawan. Akan tetapi F-FDTL sebenarnya tidak diperlukan bagi keamanan perbatasan karena Timor-Leste menyepakati dengan pemerintah Indonesia untuk demilitarisasi daerah perbatasan dan daerah tersebut dijaga oleh

polisi. Kebanyakan tentara kemudian ditempatkan di bagian timur Timor-Leste, jauh dari perbatasan. Bahkan tentara tersebut beberapa kali digunakan untuk keamanan internal, pelanggaran konstitusi Timor-Leste; sebagai contoh penyebaran mereka di Dili pada tanggal 28 April 2006 memperburuk krisis yang ada, dan mengakibatkan penurunan Perdana Menteri Mari Alkatiri. Seperti TNI, beberapa personil dalam militer dan polisi telah menggunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, mendistribusikan senjata kepada orang sipil, atau terlibat dalam penyelundupan dan korupsi.

Di samping peran yang tidak jelas serta mandat pasukan bersenjata yang disalah-mengertikan, para pemimpin Timor-Leste dan dunia internasional kurang berpikir tentang kesulitan mentransformasikan tentara kemerdekaan bawah tanah menjadi suatu pasukan pertahanan nasional. Selama pendudukan Indonesia, gerilyawan FALINTIL harus bekerja secara rahasia dan independen dalam suatu struktur yang didesentralisasikan, melakukan inisiatif mereka sendiri serta mendapatkan senjata dari pasar gelap. Perbedaan antara tentara dan penduduk sipil menjadi kabur, karena orang bergerak di antara perlawanan bersenjata dan gerakan sipil di bawah tanah, bahkan sering mengambil peran klandestin dalam aparat sipil atau militer Indonesia. Walaupun taktik-taktik dan ketrampilan ini diperlukan bagi kesuksesan gerakan gerilyawan, krisis yang terjadi saat ini menunjukkan bagaimana malapetaka bisa terjadi ketika gerakan perlawanan dipertanggungjawabkan pada suatu sistem pemerintahan dan hukum sipil.

Selama perlawanan yang berlangsung selama seperempat abad, ribuan orang Timor-Leste, laki-laki dan perempuan, berpengalaman sebagai pasukan gerilyawan. Walaupun kadang-kadang hanya berjumlah beberapa ratus tentara, dan walaupun mereka telah jarang berperang sejak tahun 1980an, para veteran FALINTIL jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang bisa dimasukkan dalam angkatan bersenjata baru. Banyak mantan pejuang tidak diberi tempat di dalam F-FDTL. Sebagian dari mereka telah berkorban selama puluhan tahun, dan walaupun hal ini tidak bisa dihindarkan, menciptakan sekelompok laki-laki yang marah, yang rentan direkrut atau dimanipulasi oleh mereka yang memiliki agenda personal atau agenda politik.

Satu lagi masalah kompleks yang terjadi adalah pembentukan dan peranan pasukan polisi, yang ditugaskan mengurus keamanan internal. Pada masa kemerdekaan, polisi Timor-Leste yang berpengalaman adalah mereka yang pernah mengabdikan diri sebagai anggota polisi pada zaman pendudukan Indonesia. Walaupun sebagian telah menunjukkan komitmen mereka terhadap rakyat Timor-Leste, loyalitas sebagian lainnya tetap dipertanyakan. Sebagian tentara masa lalu dan tentara sekarang juga memandang bahwa kepolisian mendapatkan beberapa keistimewaan, misalnya banyaknya anggota baru yang direkrut, training besar-besaran (walaupun sering tidak efektif), banyak senjata termasuk senapan otomatis, dan pembentukan brigade khusus untuk patroli perbatasan serta unit reaksi cepat. Polisi dianggap oleh sebagian tentara masa lalu maupun saat ini sebagai perampas atau lebih buruk dari itu. Pada pertengahan tahun 2006, persaingan dan ketidakpercayaan di dalam dan di antara unsur kepolisian dan tentara meningkat menjadi perang terbuka, yang mengakibatkan banyak orang tewas.

Timor-Leste memerlukan diskusi panjang lebar dan terbuka tentang peran dan struktur masa depan militernya, dan belajar meninggalkan model dan kebiasaan buruk. Sistem dwi fungsi di Indonesia yang menggunakan militer untuk menyetir pembangunan nasional membuat rezim militer Suharto menguasai ekonomi melalui monopoli, pemerasan dan sogok-menyogok. UNTAET, dengan 8.200 tentara, 1.350 polisi dan 2.000 staf sipil¹⁰ merupakan salah satu pemerintah yang paling banyak tentaranya dalam sejarah, namun hampir tidak ada peperangan sekecil apapun setelah tahun 2000. Pasukan perdamaian membangun jalan, memperbaiki jembatan dan

¹⁰ La'o Hamutuk Bulletin, April 2001 www.laohamutuk.org/Bulletin/2001/Apr/bulletinv2n1.html

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan secara lebih baik oleh orang sipil. Dengan adanya contoh-contoh buruk ini, Timor-Leste sedang mempertimbangkan tentang wajib militer tanpa memperhatikan kebutuhan keamanan negara.

Pembangunan ekonomi

Misi PBB di Timor-Leste hanya memberikan sedikit perhatian terhadap pembangunan ekonomi dan menyerahkannya kepada Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, IMF dan UNDP. Tetapi sering pejabat Timor-Leste yang tidak berpengalaman dibiarkan mempertahankan diri sendiri atau menjalankan kebijakan yang didiktekan oleh lembaga keuangan internasional, mengikuti ideologi neo-liberal, “konsensus Washington”. Awalnya hal ini termasuk pelaksanaan kebijakan seperti biaya sekolah dan pelayanan publik lainnya, pengurangan jumlah pegawai negeri, sedikitnya pembatasan investasi asing, privatisasi pelayanan publik (dan seringkali kontrak untuk pelayanan publik tersebut diberikan kepada perusahaan-perusahaan swasta, rencana untuk privatisasi infrastruktur publik, dan apa yang disebut “perdagangan bebas”. Bagian-bagian dari dogma ini kini sedang dimodifikasi sehubungan dengan adanya permintaan dari rakyat dan bencana pengangguran, tetapi beras lokal terus terdesak oleh beras impor yang lebih murah, dan listrik, telepon serta air minum tetap tidak tersedia atau mayoritas orang tidak mampu membelinya.

Para konsultan dan penasihat internasional yang bergaji tinggi sangat prihatin tentang korupsi, khususnya ketika para pejabat orang Timor-Leste tingkat menengah terlibat. Tetapi pegawai negeri sipil Timor-Leste yang paling terlatih telah belajar korupsi dari zaman Indonesia. Ketika hal itu biasa bagi orang Indonesia, namun bagi orang Timor-Leste, mencuri dari pemerintah penjajah merupakan hal yang patriotik. Ditambah lagi dengan sisa ketidakefisienan yang mewarnai aparat pemerintahan Portugal serta peraturan untuk akuntabilitas yang baru dan berlebihan, yang hasilnya adalah kelumpuhan – kebanyakan departemen pemerintah orang Timor-Leste telah tidak bisa membelanjakan alokasi anggaran mereka, dengan akibat bahwa tingkat pelayanan publik lebih terbatas daripada yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste yang sangat miskin. Pemerintah baru tersebut sedang mulai menangani permasalahan ekonomi ini, bahkan mereka menyederhanakan birokrasi bagi investor asing.

Dari tahun 2000 sampai 2005, pergerakan ekonomi Timor-Leste justru sangat ditentukan oleh keberadaan misi PBB yang menghabiskan uang lebih dari US\$ 2 milyar. Ditambah dengan sekitar \$1 milyar dalam bentuk bantuan proyek dan “bantuan” asing, sehingga jumlah totalnya 50% lebih besar dibandingkan GDP non-minyak Timor-Leste pada periode yang sama. Sayangnya, hampir semua konsultan dan tentara asing yang dipekerjakan oleh PBB dibayar atau membeli barang dan jasa impor, hanya sejumlah kecil pendapatan mereka masuk ke ekonomi lokal.¹¹ Uang yang seharusnya bisa untuk membangun sistem air minum dan jaringan tenaga listrik bagi seluruh penduduk di Dili telah dibelanjakan untuk air botolan impor dan bensin untuk generator gedung-gedung PBB. Kebijakan PBB seperti ini mengorbankan kesempatan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak, yang sebenarnya bisa menghidupkan kembali bisnis kecil orang Timor-Leste dan memberikan lapangan pekerjaan, penghasilan dan training bagi buruh dan manajer orang Timor-Leste. Seandainya langkah-langkah ini diambil, mungkin Timor-Leste telah bisa menghindari tingginya tingkat pengangguran dan marginalisasi yang menjadi akar kekerasan antar gang saat ini.

Pada awal tahun 2006, pendapatan tahunan per kapita Timor-Leste \$370; tingkat angka kelahiran tertinggi di dunia; ibu dan anak meninggal lebih cepat dibandingkan di mana pun di Asia. Seorang

¹¹ Rata-rata staf internasional PBB dibayar 30 kali lebih besar dibandingkan rata-rata staf PBB yang orang Timor. Kurang dari 1% anggaran UNTAET dan UNMISSET untuk membayar pekerja orang Timor. Lihat ibid dan La'o Hamutuk Bulletin, Mei 2003 www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/May/bulletinv4n2.html

ibu Timor-Leste rata-rata memiliki delapan anak, tetapi salah satu dari anaknya akan meninggal sebelum umur lima tahun. Pengangguran di kota sekitar 50%. Tetapi IMF optimis dan percaya bahwa "Timor-Leste telah maju dengan membuat basis ekonomi yang stabil dan sehat."¹² Kini para ahli makro-ekonomi menjadi pesimis: "Sayangnya, krisis tersebut telah membuat kemerosotan terhadap momentum pertumbuhan. IMF mendapati bahwa setelah terjadinya krisis maka pertumbuhan ekonomi tahun 2006 kini nampaknya menjadi negatif, walaupun diharapkan adanya bantuan internasional dan pengeluaran publik yang lebih tinggi di akhir tahun. Gangguan terhadap penyediaan bahan-bahan yang berhubungan dengan krisis meningkatkan inflasi sampai di atas tingkat rendah yang pernah dicapai sebelumnya, sehingga mengakibatkan kemerosotan dalam persaingan internasional. Krisis yang terjadi juga membuat pembayaran kembali hutang-hutang bank menjadi lebih buruk."¹³

Dalam dua generasi mendatang, Timor-Leste akan tergantung pada sumber minyak mereka untuk melepaskan diri dari posisinya sebagai negara termiskin kedua di Asia.¹⁴ Pada tahun 2009, 94% penghasilan pemerintah dan 90% GDP-nya akan berasal dari penjualan minyak dan gas lepas pantai. Walaupun uang ini bisa meningkatkan kehidupan rakyat, pengalaman dari negara-negara lain yang tergantung pada sumber daya alam tidaklah menjanjikan. Berbagai kesulitan dari satu hal ke hal lain: kebutuhan jangka pendek versus menabung untuk generasi masa depan, investasi dalam rakyat atau infrastruktur versus pengeluaran operasional, membangun basis dukungan politik versus memenuhi kebutuhan nasional. Cadangan minyak akan habis dalam waktu 50 tahun, dan sektor-sektor lain harus diprioritaskan untuk membuat ekonomi Timor-Leste berkesinambungan dalam jangka waktu lama. Korupsi, yang ada di mana-mana dalam industri minyak di antara perusahaan dan politisi harus dicegah. Perencanaan yang menantang, karena penduduk Timor-Leste akan mencapai dua kali lipat dalam 17 tahun, dan tidak ada yang tahu berapa harga minyak pada saat itu nanti.

Solidaritas Selamanya

Selama pendudukan Indonesia di Timor-Leste, gerakan solidaritas internasional bagi Timor-Leste penting untuk meningkatkan kenampakan pendudukan yang berlarut-larut dan biaya politis yang ada bila dibiarkan berlanjut. Beberapa faktor mungkin instruktif bagi mereka yang bekerja dalam solidaritas dengan gerakan kemerdekaan di tempat lain:

Yang dilakukan Indonesia, yang hampir bisa disebut pembantaian masal, yakni pembunuhan sekitar sepertiga penduduk Timor-Leste, merupakan kejadian terburuk sejak Perang Dunia II. Ketika Timor-Leste diduduki pada tahun 1975, militer Suharto telah membunuh lebih dari sejuta orang di Papua Barat dan di Indonesia sendiri. Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki sumber daya, pasar dan posisi strategis, dikombinasikan dengan mandat anti-komunis Suharto, yang membuatnya mendapatkan dukungan membabi-butakan dari dunia Barat.

Keterlibatan yang sinis dari negara-negara Barat yang bermuka dua terhadap Indonesia lebih terkenal daripada dukungan internasional untuk Maroko. Kunjungan pribadi Henry Kissinger dan Gerald Ford, lampu hijau yang diberikan kepada Jakarta untuk melakukan invasi, diikuti dengan peningkatan penjualan senjata dan training militer, membuat banyak orang marah. Kampanye

¹² Pernyataan oleh staf IMF dalam Kesimpulan Pasal IV Diskusi Konsultasi tahun 2006 dengan Republik Demokratik Timor-Leste, 20 Oktober 2006. www.imf.org/external/np/sec/pr/2006/pr06225.htm

¹³ Ibid.

¹⁴ Ranking indeks Perkembangan Kemanusiaan UNDP Timor-Leste's 2005 adalah 140, sementara Yaman 151, dari 177 negara. Kecuali Haiti, ini merupakan yang terburuk di dunia di luar Afrika.

melawan bantuan militer Barat terhadap pendudukan Indonesia menjadi sangat efektif selama waktu senjang antara Perang Dingin dan “Perang Global terhadap Teror”.

Walaupun pendudukan Indonesia terhadap Timor-Leste tidak dimotivasi oleh agama, orang Katolik tertekan oleh bangsa yang mayoritas berpenduduk Islam tersebut. Hal ini mendorong jaringan gereja untuk mendidik dan memobilisir penganutnya. Dan lagi, nama dan kebiasaan yang berbau Portugis dari orang Timor-Leste membuat adanya dukungan dari dunia Lusophone, di negara-negara yang sebelumnya dijajah Portugal,¹⁵ di antara rakyat Portugal dan orang Portugis diaspora di Eropa dan Amerika.

Indonesia sendiri merupakan ciptaan kolonial, memiliki nusantara dan menjadi sebuah negara setelah Perang Dunia II. Indonesia tidak memiliki kesamaan sejarah yang bisa dipakai untuk mengklaim Timor-Leste, seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negerinya kurang dari setahun sebelum mereka menduduki Timor. Rasisme dan arogansi orang Indonesia membuat mereka merendahkan kemauan, kapasitas dan kesabaran orang Timor-Leste, sementara mereka terlalu berlebihan menilai kekuatan militer mereka sendiri serta kejagoan politik mereka, yang menghasilkan sebuah perjuangan yang berlarut-larut. Mereka berhasil memenjarakan banyak orang Timor-Leste, tetapi tidak pernah berhasil memenjarakan pikiran dan hati orang Timor-Leste.

Selama masa pendudukan, perwakilan diplomatik dan negara sekutu Timor-Leste amat kurang, sehingga meningkatkan kebutuhan akan adanya solidaritas. Rezim Indonesia menerima dukungan diplomatik dari pemerintah tetangganya di Asia Tenggara. Front diplomatik Timor-Leste dan gerakan solidaritas memelihara hubungan dengan gerakan aktivis di Indonesia sendiri, juga di Filipina, Malaysia, Thailand, Jepang dan Australia, untuk meningkatkan biaya politik domestik bagi negara-negara tersebut untuk mendukung pendudukan Indonesia.

Bagi kami di gerakan anti-imperialis di negara-negara Barat, Timor-Leste merupakan kasus yang mendorong mereka untuk lebih membuka mata mereka. Ketika orang Amerika dan negara lain belajar tentang keterlibatan pemerintah-pemerintah kami dalam pembunuhan sepertiga penduduk Timor-Leste, banyak yang mulai mengajukan pertanyaan dasar tentang peran negara-negara kami di dunia, dan berpikir tentang kebijakan kriminal lain apa lagi yang telah mereka rahasiakan.

Ketika Timor-Leste mendapatkan kemerdekaan, para aktivis solidaritas harus menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa rekan yang tadinya melakukan perlawanan, kini menjadi pejabat pemerintah. Sebagian dari mereka mengubah prioritas dengan bekerja tentang isu-isu lain, yang lain bergabung dengan gerombolan konsultan dan penasihat di Timor Leste yang dibayar mahal. Tetapi banyak dari mereka yang menyadari bahwa pemerintahan sendiri hanyalah selangkah menuju kemerdekaan yang sebenarnya, dan menemukan cara untuk menemani orang-orang Timor-Leste dalam perjalanan mereka.¹⁶

Selama perjuangan untuk mendapatkan penentuan nasib sendiri, para pemimpin Timor-Leste menahan diri untuk tidak mengatakan kepada para aktivis gerakan solidaritas mengenai apa yang harus dilakukan, sehingga mereka tidak harus bertanggung jawab atas dampak negatifnya. Gerakan solidaritas lebih dapat bertahan lama ketika gerakan tersebut menghindari pengidentifikasian dengan pimpinan Timor-Leste atau partai tertentu. Para pemimpin perlawanan

¹⁵ Mozambik memberikan dukungan diplomatik, pendidikan dan rumah bagi orang-orang Timor yang mengungsi, yang kembali untuk memainkan peran kunci dalam FRETILIN dan pemerintah. Orang-orang Timor yang tetap tinggal atau pergi ke Australia, Indonesia atau Portugal benci terhadap “Mafia Mosambik.”

¹⁶ Penulis yang mewakili the International Federation for East Timor, membangun ide-ide ini dalam waktu lama dalam “The Role of International Solidarity for an Independent East Timor,” sebuah ceramah yang diberikan di Dili pada tanggal 22 Mei 2002. www.etan.org/ifet/2001plus/solid.htm

telah menjadi menteri kabinet. Walaupun para aktivis solidaritas masih menganggap para pejabat tersebut sebagai teman, gerakan internasional telah membangun hubungan baru dengan masyarakat sipil di Timor-Leste, dan mencoba mendorong pemerintahan yang bertanggung jawab

Pada akhirnya, orang Timor-Leste bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri, seperti setiap gerakan kemerdekaan yang mendapatkan kemenangan. Dengan adanya penentuan nasib sendiri maka ada tanggung jawab yang harus dipanggul. Orang-orang yang tetap berada dalam solidaritas bisa menawarkan nasihat dan dukungan, dan bergabung dalam menentang pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan mendorong jaminan atas hak politik. Tetapi ketika orang mengendalikan negara mereka sendiri, mereka harus hidup dengan kesalahan mereka sendiri. Ternyata hal tersebut lebih berat daripada yang diharapkan.